

## ABSTRAK

Notaris sebagai Pejabat Publik diberikan wewenang oleh Negara untuk membuat Akta Autentik yang artinya memiliki peran penting dalam masyarakat, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terdjdinya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris. Pengawasan terhadap Profesi Notaris merupakan kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam menjalankan pengawasan Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris yang berjenjang. Majelis Pengawas terkecil yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD). Permasalahan yang ada, MPD memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan wewenang pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris di Kabupaten Sleman.

Tujuan dari penelitian ini adalah Mengkaji Peran Majelis Pengawas Daerah terhadap Tugas Notaris bidang Kenotariatan di Kabupaten Sleman. Dan untuk mengkaji kendala-kendala dan solusi Majelis Pengawas Daerah dalam Mengawasi Notaris yang berkaitan dengan bidang Kenotariatan di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini Menggunakan Pendekatan Yuridis Empiris, Spesifikasi Penelitian adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Sumber Data yang digunakan berupa Data Primer yang diperoleh dengan Wawancara. Data Sekunder dengan Studi Pustaka. Analisa secara Kualitatif. Permasalahan dianalisa menggunakan Teori Kewenangan dan Teori Kepastian Hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Upaya-upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, MPD Kabupaten Sleman sebagai kegiatan yang bersifat preventif, dan termasuk juga di dalamnya kegiatan pembinaan terhadap Notaris di Wilayah kewenangannya. 2) Pelaksanaan pengawasan yang wajib dilakukan oleh MPD Kabupaten Sleman belum berjalan maksimal, hal ini terlihat dari : a) Kegiatan Pengawasan sebagian besar dilakukan seputar menerima laporan dari masing masing Notaris di Kabupaten Sleman mengenai Protokol Notaris; b) Peninjauan MPD Kabupaten Sleman untuk memeriksa setiap Notaris di kantor masing-masing untuk melihat situasi kantor, belum maksimal dilakukan ditambah karena *pandemic covid 19* yang mengharuskan pemeriksaan dilakukan secara daring. 3) MPD Kabupataten Sleman merasa sulit mengetahui pelanggaran jabatan, seperti praktek-praktek Notaris yang tidak jujur.

**Kata Kunci : Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Daerah.**

## ABSTRACT

Notary as Public Official is given the authority by State to make Authentic Deed which means having important role in public, so that supervision is needed. This supervision aims to minimize the occurrence of errors made by Notary. The supervision upon Notary Profession is the authority of Ministry of Law and Human Rights. In carrying out the supervision, The Minister establishes tiered Notary Supervisory Council. The smallest Supervisory Council that carries out supervisory and inspection function is Regional Supervisory Council. The problem is that Regional Supervisory Council has limitation in carrying out its supervisory and inspection authority towards Notary in Sleman Regency.

The purpose of this research is to Assess the Role of Regional Supervisory Council on Notary Duties in the field of Notary in Sleman Regency. And to assess the constraints and solutions from Regional Supervisory Council in Supervising Notaries related to the field of Notary in Sleman Regency.

This research uses Empirical Juridical Approach with Library Research and Field Research as Research Specifications. The Data Sources used are Primary Data obtained from Interviews and Secondary Data obtained from Literature Studies. The Data Sources were analyzed using Qualitative Analysis. The problems were analyzed using Authority Theory and Legal Certainty Theory.

According to the results of this research, it can be concluded that 1) The efforts to develop and supervise Notary conducted by Regional Supervisory Council of Sleman Regency are preventive activities and it includes development activities for Notary in their respective jurisdictions. 2) The implementation of supervision that must be carried by Regional Supervisory Council of Sleman Regency has not run optimally, it can be seen from : a) Most of the supervisory activities were conducted around receiving reports from each Notary in Sleman Regency regarding the Notary Protocol; b) Regional Supervisory Council of Sleman Regency review to assess each Notary at the office of each Notary to see the office situation, has not been optimally conducted because of the Covid-19 pandemic which requires assessment to be carried out online. 3) Regional Supervisory Council of Sleman Regency finds it difficult to know about office violations, such as dishonest notary practices.

**Keywords : Notary, Notary Supervisory Council, Regional Supervisory Council**